

IMPLEMENTASI TOLERANSI BERAGAMA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Dei Natalia Nopitasari ¹⁾, Riniyanti ²⁾, Suryani Lillin ³⁾, Masjelita ⁴⁾, Devi Kriyanti ⁵⁾

^{1) 2) 3) 4)} Pendidikan Agama Kristen, ⁵⁾ Kepemimpinan Kristen,

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja

E-mail: deynatalia931@gmail.com, riniyantidede@gmail.com, suryanilillin@gmail.com,
masjelita024@gmail.com, devikriyanti09@gmail.com

Submitted: 5 Juni 2025; Accepted: 8 Juni 2025; Published: 9 Juni 2025

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara multikultural menghadapi paradoks kompleks antara potensi harmoni antarumat beragama dengan realitas meningkatnya kasus intoleransi yang mengancam stabilitas sosial dan integrasi nasional. Masalah utama penelitian ini adalah kesenjangan signifikan antara konsep ideal toleransi beragama dengan implementasinya dalam kehidupan sosial masyarakat multikultural, yang dibuktikan dengan meningkatnya persentase siswa intoleran dari 2,4% pada tahun 2016 menjadi 5% pada tahun 2023, serta tercatat 32 peristiwa gangguan rumah ibadah pada periode Januari hingga September 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep teoritis toleransi beragama dalam konteks masyarakat multikultural, mengkaji dinamika dan tantangan implementasi toleransi beragama dalam kehidupan sosial, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi implementasi toleransi beragama yang lebih efektif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penelitian pustaka (*library research*) dan analisis isi (*content analysis*) terhadap jurnal-jurnal ilmiah periode 2016-2024, buku akademis, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toleransi beragama memiliki dimensi multifaset yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan behavioral yang harus terintegrasi dalam praktik kehidupan bermasyarakat, dengan faktor penghambat utama meliputi radikalisme dan ekstremisme agama, politisasi isu keagamaan, serta sistem pendidikan yang masih bercorak eksklusif, sementara faktor pendukung mencakup kearifan lokal, tradisi toleransi yang mengakar, dan berbagai *best practices* di institusi pendidikan yang menerapkan prinsip kasih, pembiasaan, dan kesetaraan. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan pemerintah yang lebih komprehensif, transformasi paradigmatis pendidikan multikultural, penguatan peran proaktif organisasi keagamaan dalam dialog antaragama, serta pengembangan sistem *monitoring* dan evaluasi yang sensitif terhadap konteks lokal untuk membangun harmoni sosial yang berkelanjutan dalam masyarakat multikultural Indonesia.

Kata kunci: Toleransi beragama; Masyarakat multikultural; Kerukunan umat beragama; Moderasi beragama; Pendidikan multikultural

Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mewujudkan keberagaman yang sangat kompleks secara nyata, dengan kekayaan budayanya yang membanggakan sekaligus menantang dalam upaya menciptakan harmoni sosial berkelanjutan. Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik majemuk dan multikultur dengan beragam agama serta keyakinan, sesuai dengan penegasan Suryawan & Danial (2016) yang menyatakan bahwa keberagaman bangsa Indonesia merupakan nilai positif yang membutuhkan perhatian khusus supaya dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan dan identitas khas Indonesia dalam pergaulan internasional. Realitas geografis Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke dengan lebih dari 17.000 pulau menciptakan ruang bagi berkembangnya 1.331 suku bangsa dan 652 bahasa daerah yang berbeda, serta enam agama yang diakui secara resmi oleh konstitusi negara (Tatang & Deak, 2022). Keberagaman ini bukan semata-mata hasil dari proses sejarah yang alamiah, melainkan juga konsekuensi dari posisi strategis Indonesia sebagai *archipelago* yang berada di persimpangan peradaban dunia, sehingga menjadi tempat pertemuan berbagai tradisi, kepercayaan, dan sistem nilai yang berbeda-beda.

Konseptualisasi multikulturalisme dalam konteks Indonesia tidak dapat terpisahkan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang secara filosofis memuat makna mendalam

mengenai transformasi perbedaan menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Menurut Purnama (2021), konsep kemajemukan budaya merujuk pada variasi yang terdapat dalam komunitas sosial akibat adanya perbedaan dalam aspek kepercayaan, etnik, kelompok, warisan budaya, sistem komunikasi, dan berbagai elemen lainnya. Komunitas yang berkarakter majemuk terbentuk melalui kombinasi dari berbagai kategori kelompok budaya yang memiliki prinsip, struktur kemasyarakatan, serta tradisi yang beragam. Pandangan multikulturalisme yang menyeluruh meliputi konsepsi, sudut pandang, strategi, sikap, dan implementasi yang diterapkan oleh masyarakat bangsa yang heterogen dalam hal etnik, warisan budaya, kepercayaan, dan aspek lainnya, namun tetap memiliki aspirasi bersama untuk membangun rasa nasionalisme yang sama serta memelihara kebanggaan terhadap kemajemukan tersebut (Suryawan & Danial, 2016). Kerangka berpikir multikulturalisme ini memerlukan apresiasi dan penghormatan kepada keragaman segmen masyarakat meliputi kelompok etnik, ras, warisan budaya, jenis kelamin, tingkatan sosial, kepercayaan, perbedaan orientasi, keyakinan, dan adat istiadat yang akan berkontribusi signifikan dalam merealisasikan transformasi pola tingkah laku sosial yang mendukung di tengah kehidupan komunitas yang beragam.

Sikap toleran dalam beragama sebagai fondasi utama untuk menciptakan komunitas multikultural yang selaras memiliki aspek yang sangat rumit dan berlapis. Menurut Casram (2016), sikap toleran beragama dapat dimaknai sebagai sebuah toleransi yang mencakup persoalan keyakinan batiniah manusia sehubungan dengan aspek keimanan atau ketuhanan yang diyakininya. Dalam hal ini, keleluasaan untuk meyakini dan memeluk agama sesuai pilihan masing-masing merupakan hak setiap individu, yang juga disertai dengan sikap menghargai pelaksanaan ajaran yang diamalkan atau dipercayai orang lain. Sebagai perwujudan dari manifestasi pengalaman spiritual dalam konteks komunal, sikap toleran beragama merupakan respons manusia yang religius terhadap suatu kenyataan absolut, sebagaimana pemikiran Joachim Wach. Respons tersebut diekspresikan dalam wujud hubungan sosial, baik antar pemeluk agama yang sama maupun yang berbeda (Casram, 2016). Gagasan mengenai toleransi ini perlu ditopang oleh wawasan pengetahuan yang komprehensif, mentalitas yang terbuka, komunikasi timbal balik, serta kebebasan berpikir dan beragama. Dengan demikian, toleransi dapat menjadi sepadan dengan perilaku yang konstruktif dan sikap menghargai sesama sebagai bagian dari pemanfaatan hak-hak fundamental kemanusiaan.

Penerapan sikap saling menghargai antar pemeluk agama di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya tidak bisa dipisahkan dari fungsi vital dunia pendidikan sebagai alat untuk membentuk kepribadian dan prinsip-prinsip kebangsaan. Pancasila berfungsi sebagai landasan ideologi dan pemikiran filosofis bagi kondisi kemajemukan masyarakat Indonesia. Menurut penelitian Habibah dan rekan-rekan (2022), sebagai fondasi filosofi negara, Pancasila berperan sebagai acuan sekaligus teladan bagi rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan berkebangsaan. Dalam kapasitasnya sebagai pandangan hidup nasional, Pancasila merupakan mata air nilai-nilai dan etika bagi bangsa Indonesia, sehingga eksistensi dan kontribusinya menjadi dasar dari segala dasar hukum dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendidikan yang mengakui kemajemukan menjadi sangat krusial dalam konteks ini karena dapat menampung diversitas dan heterogenitas sebagai akibat dari variasi budaya, etnis, suku, dan kelompok agama, dengan mengutamakan filosofi pluralisme budaya dalam sistem pendidikan yang berlandaskan pada asas-asas kesetaraan, saling menghargai dan menerima serta memahami dan adanya dedikasi moral untuk mencapai keadilan sosial.

Sejumlah kendala dan rintangan yang signifikan masih dihadapi dalam realitas penerapan sikap saling menghargai antar umat beragama dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Informasi terkini dari SETARA Institute periode Januari 2022 sampai akhir September 2022 memperlihatkan adanya minimal 32 kejadian gangguan terhadap

tempat-tempat beribadah, sebagaimana dikemukakan Sunarno dan tim (2023), di mana angka tersebut tergolong tinggi jika dibandingkan dengan data tahunan pada kategori serupa dalam lima tahun sebelumnya. Tidak hanya terbatas pada konflik fisik, gejala intoleransi ini juga meliputi beragam bentuk diskriminasi tersembunyi yang terwujud dalam aktivitas keseharian masyarakat. Sikap saling menghargai antar pemeluk agama masih merupakan persoalan yang sangat peka dan mudah menimbulkan konflik horizontal di masyarakat, sebagaimana dibuktikan oleh kasus-kasus seperti penentangan terhadap pembangunan gereja di Bogor tahun 2008, penolakan pembangunan vihara di Tanjung Balai tahun 2016, serangan dan pembakaran masjid di Sampang tahun 2012, serta penentangan pembangunan Gereja HKBP di Bekasi tahun 2010.

Persoalan ketidakharmonisan antar kelompok agama di dunia akademik menjadi semakin memprihatinkan karena institusi pendidikan yang seharusnya menjadi pilar kerukunan malah berubah menjadi sarang tumbuhnya sikap-sikap diskriminatif. Berdasarkan laporan Ondja beserta timnya (2023) yang mengutip riset Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), teridentifikasi berbagai kejadian diskriminasi di lingkungan akademik selama periode 2014-2022, mencakup enam peristiwa pelanggaran pemakaian penutup kepala atau hijab bagi siswa, serta 17 kasus pemaksaan penggunaan jilbab atau hijab oleh guru kepada murid-muridnya antara 2017-2022. Data survei SETARA Institute pada jenjang SMA mengungkapkan kondisi yang lebih mengkhawatirkan, yakni adanya kenaikan proporsi siswa dalam kategori intoleran aktif dari 2,4% di tahun 2016 menjadi 5% pada tahun 2023. Realitas ini mengindikasikan bahwa lembaga pendidikan yang idealnya menjadi tempat berkembangnya sikap saling menghargai malah bertransformasi menjadi area persemaian diskriminasi, di mana masyarakat tidak lagi memandang pluralitas sebagai keniscayaan yang harus diterima, melainkan sebagai ancaman yang perlu dihindari.

Isu ketidakharmonisan antar pemeluk kepercayaan dalam masyarakat yang beragam tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya faham-faham ekstremisme dan radikalisme yang berlandung di balik nama agama. Susanti (2022) memaparkan bahwa Indonesia selaku negara dengan kekayaan keberagaman luar biasa yang mencakup variasi etnis, bangsa, bahasa, tradisi dan kepercayaan kini kerap berhadapan dengan permasalahan radikalisme, di mana kelompok-kelompok yang mengklaim mewakili golongan tertentu semakin menguat dan secara gamblang menyerukan ideologi mereka. Realitas ini membuktikan bahwa moderasi dalam beragama menjadi komponen yang diperlukan guna memupuk sikap saling memahami dan menghargai perbedaan, dengan harapan dapat merealisasikan harmoni antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Ekstremisme agama yang diartikan sebagai upaya memaksakan pandangan, kehendak, dan cita-cita keagamaan melalui jalur kekerasan telah menjadi ancaman nyata bagi persatuan bangsa dan implementasi nilai-nilai saling menghargai dalam kehidupan sosial.

Dalam ranah hubungan antar pemeluk kepercayaan, kemunculan konflik keagamaan seringkali bersumber dari keliru dalam menafsirkan kitab suci dan minimnya komunikasi yang produktif. Mallelang beserta rekan-rekannya (2022) menunjukkan bahwa konflik sosial berpotensi muncul dalam komunitas multi-agama, khususnya dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, di mana salah satu pemicu utamanya adalah adanya kekeliruan manusiawi dalam menafsirkan kitab suci. Sejumlah kalangan memaknai teks keagamaan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan dimensi historis, psikologis, sosial, budaya, dan kondisi kontekstual lingkungan sekitar, sehingga berisiko memicu diskriminasi berkaitan dengan perbedaan ras, budaya, dan agama. Kondisi ini selanjutnya mendorong semua elemen masyarakat, terutama para ahli ilmu sosial, untuk berupaya keras mencari dan merumuskan solusi melalui internalisasi nilai-nilai saling menghargai dan pendidikan yang mengakui kemajemukan.

Kajian-kajian sebelumnya yang membahas sumbangsih agama Kristen dalam mengembangkan sikap toleran antarumat beragama telah menyumbangkan pemahaman vital mengenai dinamika pluralisme di Indonesia. Studi Ondja et al. (2023) mengeksplorasi implementasi pembelajaran PAK yang berwawasan multikultural dan menemukan bahwa fondasi penghormatan terhadap individu lain harus bertumpu pada cinta kasih universal, melampaui batas-batas etnis, kepercayaan, maupun asal suku. Setiap manusia layak mendapat pengakuan dan perlakuan sebagai penerima kasih dalam tatanan masyarakat yang majemuk. Hasil riset menegaskan bahwa PAK mengadvokasi nilai-nilai seperti respek terhadap sesama, reverensi kepada Tuhan, serta bantuan tulus antarindividu, melampaui hierarki sosial. Signifikansi PAK diwujudkan melalui pengadaan materi pembelajaran supaya siswa dan guru menginternalisasi ajaran Kristus dan mengembangkan semangat melayani dalam lingkungan akademik yang heterogen. Temuan ini mengindikasikan bahwa edukasi agama Kristen berpotensi besar membentuk karakter yang toleran dan inklusif.

Riset Tatang & Deak (2022) tentang kontribusi PAK dalam memelihara interaksi sosial di masyarakat yang multikultural menyoroti kepentingan membangun perspektif keagamaan yang fleksibel, pluralistik, namun tetap inklusif. Kajian ini menekankan perlunya komunitas Kristen mengembangkan pemahaman agama yang dapat mengapresiasi diversitas dan hidup harmonis dalam perbedaan yang signifikan. Keragaman yang tajam dapat menjadi mosaik yang mempesona jika dipelihara dengan hati yang lapang. Salah satu strategi untuk mempertahankan kemajemukan adalah melalui pendidikan, karena tidak terbantahkan bahwa pendidikan sangat menentukan kemajuan atau kemunduran peradaban. Penelitian juga mengidentifikasi bahwa proses pembelajaran agama di institusi pendidikan sangat efektif untuk pembinaan masyarakat, namun masih cenderung eksklusif baik di sekolah umum maupun yang berbasis agama.

Adawiyah et al. (2019) memberikan gambaran konkret implementasi toleransi beragama dalam konteks pendidikan melalui analisis penerapan pendidikan multikultural di SMP Immanuel Batu untuk menciptakan toleransi antarumat beragama. Hasil menunjukkan pendidikan multikultural diterapkan dalam setiap proses pembelajaran di dalam dan luar kelas, di dalam dan luar sekolah, dengan implementasi berupa event keagamaan, hari Kartini, dan bulan bahasa. Bentuk toleransi yang ditemukan adalah kebebasan menjalankan syariat agama masing-masing siswa, dengan strategi penerapan melalui kasih dan pembiasaan. Faktor pendukung adalah fasilitas ibadah, sedangkan faktor penghambat sering dari guru dan siswa sendiri.

Kajian Amtiran & Kriswibowo (2024) yang mengeksplorasi kepemimpinan keagamaan dan komunikasi lintas agama sebagai pendekatan pembangunan komunitas multikultural berdasarkan moderasi beragama mengidentifikasi bahwa moderasi beragama dengan karakteristik keadilan, keseimbangan, dan toleransi menjadi elemen fundamental dalam mencegah konflik serta mempertahankan keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam. Kontribusi strategis para pemimpin agama dalam mengadvokasi moderasi beragama menjadi sangat vital melalui edukasi keagamaan yang inklusif, kultivasi toleransi, dan komunikasi antaragama. Temuan utama riset ini mengenai urgensi dialog antaragama adalah untuk membangun pemahaman dan menghargai kebebasan berkeyakinan, serta memperkuat toleransi melalui interaksi yang terbuka dan konstruktif. Selain itu, signifikansi pendidikan agama yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum dinilai fundamental untuk membentuk generasi muda yang moderat dan mendukung pembangunan masyarakat multikultural yang harmonis.

Sebuah studi oleh Nugroho & Ni'mah (2018) yang mengkaji gagasan pendidikan Islam berorientasi kerukunan dalam konteks masyarakat multikultural, memberikan sebuah perspektif perbandingan yang menarik. Kajian tersebut mengulas bagaimana agama-agama bisa memberi sumbangsih dalam pembentukan toleransi. Penelitian ini menekankan bahwa

pendidikan Islam yang memiliki wawasan kerukunan adalah suatu sistem edukasi yang sanggup menggunakan keberagaman sebagai sebuah sarana untuk menjadikan seseorang individu yang lebih taat tanpa menyalahi kodratnya (fitrah), yaitu melalui pengajaran metode hidup di tengah-tengah pluralitas bangsa. Gagasan ini dilandasi oleh prinsip fitrah, mengambil jalan tengah (moderat), membawa misi kemanusiaan, serta bersikap inklusif dalam keberagamaan. Landasan lainnya adalah keyakinan bahwa kemajemukan merupakan ketetapan Tuhan (*sunnatullah*), kebenaran memiliki sifat pribadi dan juga universal, serta adanya kapasitas untuk hidup berdampingan secara damai dan berkolaborasi dengan penganut keyakinan lain.

Fokus penelitian yang penting juga telah menjadi dinamika hubungan Islam dan Kristen dalam konteks toleransi beragama. Penelitian Arifin (2021) tentang implementasi toleransi umat beragama melalui telaah hubungan Islam dan Kristen di Duren Sewu Pasuruan Jawa Timur menunjukkan bahwa baik dalam Islam maupun Kristen terdapat hubungan yang baik dalam kerangka keagamaan dan sosial. Beberapa bidang kerukunan umat beragama ditemukan dalam membangun hubungan sosial yaitu pekarangan rumah sebagai tempat ibadah, mata air desa, balai desa dan lapangan desa. Gambaran konkret tentang bagaimana toleransi beragama dapat diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat multikultural diberikan oleh penelitian ini, dimana ruang-ruang bersama menjadi medan untuk membangun kerukunan dan saling pengertian antar umat beragama.

Sebuah ilustrasi menarik mengenai bagaimana toleransi beragama bisa direalisasikan dalam lingkungan akademik yang sangat heterogen dipaparkan dalam studi Muzakki & Santoso (2023). Penelitian tersebut secara khusus mengkaji implementasi nilai-nilai toleransi pada kalangan mahasiswa UNIMUDA Sorong di dalam lingkup pendidikan tinggi. Riset ini memperlihatkan sebuah fakta penting di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong; meskipun berstatus sebagai institusi pendidikan tinggi Islam, komposisi demografinya didominasi oleh 70% mahasiswa non-Muslim yang beragama dan 30% mahasiswa Muslim. Temuan studi ini menunjukkan bahwa tidak pernah sekalipun terjadi gesekan atau konflik yang dipicu oleh sentimen kesukuan, ras, maupun agama. Realisasi dari penerapan nilai toleransi ini termanifestasi dalam beberapa wujud. Di antaranya adalah sikap saling memahami, menghargai, dan mengapresiasi ajaran keyakinan setiap individu, sehingga tidak ada yang mudah merasa tersinggung saat menghadapi perbedaan.

Penelitian Simanjuntak & Aritontang (2024) tentang penerapan nilai-nilai Kristiani dalam lingkungan masyarakat heterogen memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai agama dapat menjadi kekuatan pemersatu dalam keberagaman. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Kristiani dalam meningkatkan keharmonisan bermasyarakat, terutama mengingat negara Indonesia memiliki banyak perbedaan baik suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Dengan adanya perbedaan ini, seringkali memicu terjadinya pertentangan serta perselisihan, sehingga nilai-nilai Kristiani perlu dipelihara guna untuk keharmonisan serta keutuhan negara. Penelitian ini memberikan contoh konkret seperti yang terjadi di SMA Katolik Santo-Fransiskus Xaverius di Rute NTT, dimana Ketua OSIS dari sekolah tersebut adalah seorang siswi dari agama Muslim, yang menunjukkan bahwa toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan dapat diwujudkan dalam praktik kehidupan nyata.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika toleransi beragama dalam masyarakat multikultural, namun masih terdapat kesenjangan (*gap*) antara konsep ideal toleransi beragama dengan realitas implementasinya di lapangan. Idealnya, dalam masyarakat multikultural yang menganut prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa tekanan atau diskriminasi dari pihak manapun. Prinsip toleransi

beragama mengharuskan adanya sikap saling menghormati, menerima, dan menghargai perbedaan dalam pelaksanaan ibadah dan keyakinan masing-masing agama. Dalam konteks pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan seharusnya menjadi laboratorium hidup bagi implementasi nilai-nilai toleransi, dimana peserta didik dari berbagai latar belakang agama dapat belajar bersama dalam suasana yang harmonis dan saling menghargai. Sektor publik dan ruang-ruang bersama seharusnya menjadi arena netral dimana semua warga negara dapat berpartisipasi tanpa memandang latar belakang agamanya.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi toleransi beragama masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang signifikan. Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa kasus-kasus intoleransi justru mengalami peningkatan, baik dalam bentuk diskriminasi halus maupun konflik terbuka. Dalam konteks pendidikan, yang seharusnya menjadi benteng toleransi, masih ditemukan praktik-praktik diskriminatif seperti pemaksaan penggunaan atribut keagamaan tertentu, pembatasan hak siswa minoritas dalam kegiatan sekolah, bahkan penolakan terhadap kepemimpinan siswa dari agama minoritas. Fenomena ini menunjukkan bahwa toleransi beragama belum terinternalisasi secara mendalam dalam sistem pendidikan nasional, sehingga lembaga pendidikan justru menjadi tempat reproduksi sikap-sikap intoleran. Di ruang publik, masih sering terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah, diskriminasi dalam pelayanan publik, dan marginalisasi kelompok agama minoritas dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

Kesenjangan antara idealitas dan realitas ini juga tercermin dalam implementasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Meskipun Indonesia memiliki berbagai regulasi yang melindungi kebebasan beragama dan menjamin hak-hak warga negara tanpa membedakan agama, namun implementasi di tingkat grassroots masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti pemahaman keagamaan yang eksklusif, politisasi isu agama, ketidakpahaman terhadap nilai-nilai multikulturalisme, dan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus intoleransi menjadi penghambat utama dalam implementasi toleransi beragama. Selain itu, masih kuatnya sentimen primordial dan identitas sektarian dalam masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam membangun harmoni sosial yang berkelanjutan.

Dalam konteks global, fenomena intoleransi beragama juga tidak dapat dipisahkan dari pengaruh gerakan-gerakan transnasional yang mempromosikan paham-paham eksklusivisme agama. Arus globalisasi informasi yang tidak terkontrol telah memungkinkan masuknya ideologi-ideologi radikal yang dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap agama dan pluralitas. Media sosial dan platform digital lainnya seringkali menjadi sarana penyebaran narasi-narasi intoleran yang dapat memecah belah harmoni sosial. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi toleransi beragama tidak hanya menjadi isu domestik, tetapi juga berkaitan dengan dinamika global yang lebih luas.

Urgensi penelitian tentang implementasi toleransi beragama dalam kehidupan sosial masyarakat multikultural menjadi semakin penting mengingat berbagai tantangan kontemporer yang dihadapi Indonesia. Pertama, dari aspek sosial-politik, meningkatnya fenomena intoleransi dan radikalisme yang mengatasnamakan agama telah mengancam stabilitas sosial dan integrasi nasional, dimana kasus-kasus konflik horizontal yang bernuansa SARA masih terus terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa fondasi toleransi beragama dalam masyarakat Indonesia masih rapuh dan memerlukan penguatan sistematis. Kedua, dari aspek pendidikan dan generasi muda, hasil survei menunjukkan adanya tren mengkhawatirkan dalam sikap toleransi di kalangan pelajar dengan meningkatnya persentase siswa yang menunjukkan sikap intoleran dari 2,4% pada tahun 2016 menjadi 5% pada tahun 2023, sementara munculnya kasus-kasus diskriminasi di lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional belum berhasil optimal dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan

multikulturalisme. Ketiga, masih terdapat kesenjangan signifikan antara konsep ideal toleransi beragama dengan realitas implementasinya di lapangan, dimana meskipun Indonesia memiliki berbagai regulasi yang melindungi kebebasan beragama, namun implementasi di tingkat *grassroots* masih menghadapi tantangan seperti pemahaman keagamaan yang eksklusif, politisasi isu agama, dan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus intoleransi. Keempat, dari aspek akademis, masih terbatasnya penelitian komprehensif yang mengkaji implementasi toleransi beragama secara holistik dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia, sehingga belum memberikan gambaran utuh tentang dinamika toleransi beragama dalam kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama yang saling berkaitan dan mendukung upaya pemahaman komprehensif tentang implementasi toleransi beragama dalam masyarakat multikultural Indonesia. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep teoritis tentang toleransi beragama dalam konteks masyarakat multikultural, termasuk berbagai definisi, dimensi, dan indikator toleransi beragama yang telah dikembangkan dalam literatur akademis, dimana analisis konseptual ini penting untuk memberikan landasan teoretis yang kuat bagi pemahaman tentang toleransi beragama dan implementasinya dalam kehidupan sosial masyarakat multikultural. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika dan tantangan dalam implementasi toleransi beragama dalam kehidupan sosial masyarakat multikultural Indonesia, termasuk faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi toleransi beragama, dimana kajian ini akan mengidentifikasi berbagai bentuk intoleransi yang masih terjadi dalam masyarakat, pola-pola diskriminasi yang berkembang, serta akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya intoleransi beragama. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi implementasi toleransi beragama yang lebih efektif dalam kehidupan sosial masyarakat multikultural Indonesia, dimana rekomendasi ini akan mencakup aspek kebijakan, strategi implementasi, penguatan kapasitas institusi, dan pengembangan program-program yang dapat mendukung upaya membangun toleransi beragama dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi upaya pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai *stakeholder* lainnya dalam membangun harmoni sosial yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Untuk menelaah bagaimana implementasi toleransi beragama berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat multikultural Indonesia, penelitian ini mengadopsi sebuah pendekatan kualitatif. Metode yang secara spesifik digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pilihan pendekatan ini sejalan dengan pandangan Creswell (2014) yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah cara untuk mengeksplorasi serta memahami makna dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan dengan bertumpu pada sudut pandang partisipan dan analisis data yang bersifat induktif. Di sisi lain, Sugiyono (2017) juga memberikan penegasan bahwa metode penelitian kualitatif dilandasi oleh filsafat postpositivisme yang digunakan untuk menginvestigasi kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti memegang peranan sebagai instrumen kunci. Arikunto (2019) menambahkan bahwa penelitian kualitatif berusaha mengungkap keunikan dalam masyarakat secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sumber data penelitian ini meliputi jurnal-jurnal ilmiah periode 2016-2024, buku akademis, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan toleransi beragama dan multikulturalisme di Indonesia. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan induktif yang melibatkan pengumpulan dan inventarisasi literatur, *coding* data penting, kategorisasi berdasarkan tema utama, triangulasi sumber untuk validitas temuan, sintesis dan interpretasi data, serta penarikan

kesimpulan dan perumusan rekomendasi berdasarkan analisis komprehensif yang memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Konseptualisasi Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural

1. Definisi dan Dimensi Toleransi Beragama

Toleransi beragama sebagai konstruk fundamental dalam kehidupan masyarakat multikultural memiliki kompleksitas konseptual yang mendalam dan multidimensional, dimana pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ini menjadi prasyarat utama bagi implementasi harmoni sosial yang berkelanjutan. Casram (2016) mengemukakan sebuah definisi yang sangat praktis, di mana toleransi beragama diartikan sebagai suatu bentuk toleransi yang mencakup persoalan-persoalan keyakinan batiniah seseorang yang berhubungan dengan akidah atau aspek ketuhanan yang dipegangnya. Menurutnya, setiap individu harus memiliki kebebasan untuk meyakini serta memeluk agama yang dipilihnya, dan pada saat yang sama juga menghormati praktik ajaran-ajaran yang dianut atau dipercayai orang lain. Definisi tersebut meletakkan penekanan pada dimensi kebebasan individual dan apresiasi komunal, yang mengindikasikan bahwa toleransi beragama bukanlah sikap diam dalam menerima keragaman semata. Sebaliknya, ia adalah sebuah sikap proaktif untuk mengakui sekaligus menghargai hak-hak keagamaan yang dimiliki oleh individu lainnya.

Dimensi toleransi beragama dapat dipahami melalui tiga aspek yang saling berkaitan dan membentuk kesatuan utuh dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Dimensi kognitif toleransi beragama mencakup pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang keberagaman agama serta pengakuan terhadap legitimasi keyakinan yang berbeda, dimana Casram (2016) menekankan bahwa konsep toleransi harus didukung oleh cakrawala pengetahuan yang luas, bersikap terbuka, dialog, kebebasan berpikir dan beragama. Dimensi afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, dan emosi positif terhadap keberagaman agama, yang termanifestasi dalam bentuk penghargaan, empati, dan penerimaan terhadap perbedaan keyakinan tanpa prasangka atau stereotip negatif. Sementara dimensi *behavioral* atau perilaku mencakup tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap toleran, seperti partisipasi dalam kegiatan lintas agama, penghormatan terhadap praktik ibadah agama lain, dan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan sosial tanpa memandang latar belakang keagamaan. Ketiga dimensi ini harus terintegrasi secara harmonis agar toleransi beragama tidak hanya menjadi konsep teoretis, melainkan praktik hidup yang autentik dan berkelanjutan.

Dalam konteks akademis, penting untuk membedakan secara tegas antara konsep toleransi, pluralisme, dan multikulturalisme, meskipun ketiganya memiliki keterkaitan erat dalam diskursus tentang keberagaman. Toleransi pada dasarnya merupakan sikap menghormati dan menerima perbedaan tanpa harus menyetujui atau mengadopsi keyakinan yang berbeda tersebut, sehingga toleransi setara dengan sikap positif dan menghargai orang lain dalam rangka menggunakan kebebasan asasi sebagai manusia (Casram, 2016). Pluralisme, di sisi lain, merupakan pandangan yang tidak hanya menerima keberagaman tetapi juga mengakui bahwa keberagaman tersebut memiliki nilai positif dan kontribusi yang setara dalam kehidupan bersama. Sementara multikulturalisme merupakan paradigma yang lebih komprehensif yang tidak hanya mengakui keberagaman tetapi juga mengembangkan sistem sosial, politik, dan budaya yang memungkinkan semua kelompok budaya dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Landasan Teoretis Masyarakat Multikultural

Dalam kajian sosiologis, multikulturalisme dipahami sebagai paradigma yang mengafirmasi dan mengapresiasi diversitas budaya, etnis, agama, serta identitas lainnya sebagai kekayaan sosial yang perlu dikelola secara konstruktif demi mewujudkan harmoni dan

keadilan sosial. Multikulturalisme, menurut Purnama (2021), merujuk pada keberagaman yang ada dalam suatu komunitas akibat perbedaan agama, ras, suku, etnis, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Masyarakat multikultural adalah kondisi komunitas yang terdiri dari berbagai kelompok budaya, nilai, organisasi sosial, dan adat istiadat yang berbeda. Konsep ini muncul sebagai jawaban atas realitas sosial modern yang semakin kompleks dan heterogen, karena pendekatan "melting pot" atau asimilasi total tidak lagi dianggap efektif dalam mengelola keberagaman. Suryawan & Danial (2016) mengembangkan definisi ini, menyatakan bahwa multikulturalisme mencakup gagasan, perspektif, kebijakan, sikap, dan tindakan masyarakat suatu negara yang majemuk secara etnis, budaya, dan agama. Namun, masyarakat ini tetap memiliki visi untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama serta kebanggaan dalam mempertahankan kemajemukan tersebut. Paradigma ini menuntut pengakuan dan apresiasi terhadap diversitas kelompok masyarakat, seperti etnis, ras, budaya, gender, strata sosial, agama, perbedaan kepentingan, keyakinan, dan tradisi. Hal ini sangat membantu mewujudkan transformasi format perilaku sosial yang kondusif di tengah kehidupan masyarakat yang plural.

Karakteristik masyarakat multikultural Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari masyarakat multikultural di negara-negara lain, terutama karena keberagaman ini bukan hasil dari imigrasi atau kolonisasi, melainkan kekayaan alamiah yang telah ada sejak awal sejarah bangsa. Republik Indonesia menampilkan wajah sebagai bangsa yang plural dengan warisan tradisi yang sangat beragam, dimana kemajemukan ini lahir dari kondisi geografis nusantara yang berbentuk kepulauan serta keberadaan aneka kelompok etnis, keyakinan spiritual, adat-istiadat, profesi, dan ekspresi seni yang bervariasi. Keragaman spiritual tercermin melalui enam ajaran resmi yang diakui pemerintah yaitu Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, bersama ratusan sistem kepercayaan lokal yang masih dilestarikan berbagai komunitas di seluruh archipelago. Sebagai negara yang lahir dari kemajemukan budaya dan keyakinan spiritual, Indonesia membentuk masyarakat plural dengan filosofi "Bersatu dalam Perbedaan" yang menggambarkan variasi warisan tradisi di tanah air, ditambah dengan keunikan masyarakat nusantara dalam mengembangkan perpaduan budaya dan spiritualitas yang harmonis, dimana aneka tradisi leluhur dapat hidup berdampingan dengan ajaran-ajaran besar dunia sambil mempertahankan identitas masing-masing.

Hubungan antara multikulturalisme dan toleransi beragama dalam konteks Indonesia bersifat dialektis dan saling memperkuat, dimana multikulturalisme menyediakan *framework* struktural untuk pengakuan keberagaman, sementara toleransi beragama memberikan mekanisme praktis untuk interaksi harmonis antar kelompok yang berbeda. Payung ideologis dan filosofisnya dari Pancasila didapatkan oleh kondisi multikultural bangsa Indonesia, sebagaimana ditekankan Habibah et al. (2022), dimana sebagai dasar falsafah negara, Pancasila adalah pedoman sekaligus panutan bagi bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber nilai-nilai dan moral bagi bangsa Indonesia merupakan Pancasila dalam posisinya sebagai pandangan hidup bangsa, sehingga fungsi dan perannya adalah menjadi sumber dari semua sumber hukum dari semua undang-undang yang ada di Indonesia. Bukan hanya menjadi pilihan pragmatis untuk menjaga stabilitas sosial, tetapi juga merupakan imperatif moral yang berasal dari nilai-nilai luhur bangsa yang terkristalisasi dalam Pancasila menjadi toleransi beragama dalam konteks ini.

3. Indikator dan Parameter Toleransi Beragama

Indikator toleransi beragama dalam kehidupan sosial dapat diidentifikasi melalui berbagai manifestasi konkret dalam interaksi sehari-hari antar umat beragama, yang mencakup aspek individual, komunal, dan institusional. Muzakki & Santoso (2023) menjelaskan bahwa nilai toleransi dapat diimplementasikan melalui beberapa cara. Ini termasuk upaya untuk memahami, menghormati, dan menghargai ajaran setiap agama, yang bertujuan agar individu

tidak mudah tersinggung oleh perbedaan. Selain itu, penting untuk menghindari topik pembicaraan yang dapat menyentuh prinsip keyakinan seseorang. Mereka juga menekankan pentingnya saling mengingatkan untuk selalu menaati perintah agama masing-masing. Terakhir, implementasi toleransi melibatkan pemberian porsi yang sama kepada setiap individu, baik dalam konteks pembelajaran, kegiatan kemasyarakatan, maupun interaksi sosial lainnya. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa toleransi beragama tidak hanya berkaitan dengan sikap pasif tidak mengganggu, tetapi juga sikap aktif dalam membangun hubungan yang konstruktif dan saling mendukung. Arifin (2021) menambahkan indikator konkret melalui temuannya tentang bidang kerukunan umat beragama yaitu pekarangan rumah sebagai tempat ibadah, mata air desa, balai desa dan lapangan desa, yang menunjukkan bahwa toleransi beragama termanifestasi dalam penggunaan bersama ruang-ruang publik dan sumber daya komunal tanpa diskriminasi agama.

Parameter pengukuran tingkat toleransi masyarakat memerlukan instrumen yang komprehensif dan sensitif terhadap konteks lokal, yang dapat mengukur tidak hanya sikap eksplisit tetapi juga perilaku implisit dalam interaksi sosial. Rahimah & Amaluddin (2021) memberikan gambaran tentang pentingnya mengukur toleransi melalui interaksi sosial yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat, dimana moderasi beragama dengan menerapkan sikap toleransi perlu dibangun kepada masyarakat sebagai suatu pengakuan atas keberadaan pihak lain sebagai sikap menghormati adanya berbagai macam perbedaan. Parameter yang dapat digunakan meliputi tingkat partisipasi dalam kegiatan lintas agama, frekuensi interaksi positif antar kelompok agama yang berbeda, tingkat penerimaan terhadap kepemimpinan dari agama minoritas, dan tingkat dukungan terhadap hak-hak keagamaan kelompok lain. Simanjuntak & Aritontang (2024) memberikan contoh parameter konkret melalui kasus di SMA Katolik Santo-Fransiskus Xaverius di Rute NTT, dimana Ketua OSIS dari sekolah tersebut adalah seorang siswi dari agama Muslim, yang menunjukkan bahwa toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan dapat diukur melalui keterbukaan dalam kepemimpinan dan representasi.

Model-model toleransi beragama dalam konteks global dan lokal menunjukkan variasi pendekatan yang dapat diadaptasi sesuai dengan karakteristik masyarakat masing-masing, dimana tidak ada satu model universal yang dapat diterapkan di semua konteks. Amtiran & Kriswibowo (2024) mengidentifikasi bahwa prinsip adil, seimbang, dan toleran dari moderasi beragama menjadi kunci untuk mencegah konflik dan menjaga harmoni dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks ini, kepemimpinan agama memiliki peran strategis dalam mempromosikan moderasi beragama melalui pendidikan agama yang inklusif, pengembangan toleransi, dan dialog antaragama. Model toleransi yang berkembang di Indonesia memiliki karakteristik unik yang menggabungkan nilai-nilai religius dengan kearifan lokal. Ini terlihat jelas dalam konsep *tepa selira* dalam budaya Jawa, *pela gandong* di Maluku, atau *menyama braya* di Bali. Nugroho & Ni'mah (2018) menggambarkan model pendidikan Islam berwawasan kerukunan yang mampu menjadikan perbedaan sebagai alat untuk menjadi pribadi yang taat tanpa keluar dari fitrahnya. Model ini mengajarkan cara hidup di tengah pluralitas bangsa, berpijak pada konsep fitrah, bersifat moderat, mengusung misi kemanusiaan (humanisme), inklusif dalam beragama, meyakini kemajemukan adalah *sunnatullah*, dan memahami bahwa kebenaran bersifat privat serta universal.

B. Dinamika Dan Tantangan Implementasi Toleransi Beragama Di Indonesia

1. Kondisi Faktual Toleransi Beragama dalam Masyarakat Indonesia

Gambaran umum kerukunan umat beragama di Indonesia menunjukkan paradoks yang kompleks antara potensi harmoni yang besar dengan tantangan intoleransi yang nyata, dimana di satu sisi Indonesia memiliki tradisi toleransi yang mengakar kuat dalam sejarah dan budaya bangsa, namun di sisi lain menghadapi berbagai manifestasi intoleransi yang mengancam stabilitas sosial. Pritantia et al. (2021) menguraikan bahwa sebagai bangsa yang besar,

Indonesia memiliki populasi yang padat, kekayaan alam yang melimpah ruah, wilayah yang luas, serta keberagaman budaya daerah dan bahasa yang sangat bervariasi. Kondisi ini memberikan potensi positif yang besar, namun juga membawa potensi masalah yang beragam. Keberagaman ini telah membentuk pola hubungan sosial yang unik, di mana agama menjadi pedoman hidup. Agama membekali individu dengan petunjuk untuk diri sendiri dan hubungannya dengan Tuhan, yang kemudian mendorong masyarakat untuk memiliki adab dan ilmu agar dapat beradaptasi dengan kehidupan sosial, di mana kepentingan umum selalu diutamakan. Meskipun demikian, fakta menunjukkan bahwa toleransi beragama di Indonesia tidaklah seragam. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, dinamika politik, dan faktor-faktor sosio-ekonomi yang berkembang di setiap daerah.

Kasus-kasus intoleransi dan konflik keagamaan di Indonesia selama satu dekade terakhir memperlihatkan pola yang mengkhawatirkan, menandakan adanya kemunduran dalam praktik toleransi beragama. Sunarno et al. (2023) melaporkan data terbaru dari SETARA Institute, yang menunjukkan setidaknya 32 peristiwa gangguan rumah ibadah terjadi dari Januari hingga akhir September 2022. Angka ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan data tahunan pada kategori yang sama dalam lima tahun terakhir: 44 peristiwa (2021), 24 peristiwa (2020), 31 peristiwa (2019), 20 peristiwa (2018), dan 17 peristiwa (2017). Kasus-kasus nyata yang menggambarkan intoleransi ini meliputi penolakan pembangunan gereja di Bogor pada 2008, penolakan pembangunan vihara di Tanjung Balai pada 2016, penyerangan dan pembakaran masjid di Sampang pada 2012, serta penolakan pembangunan Gereja HKBP di Bekasi pada 2010. Dalam konteks pendidikan, Ondja et al. (2023) melaporkan hasil kajian Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang menemukan beberapa kasus intoleransi di lingkungan pendidikan antara tahun 2014-2022. Salah satu contohnya adalah kasus di SDN Jomin Barat II, Cikampek, Kabupaten Karawang, di mana seorang siswi menjadi sasaran pelecehan dari siswa lain, guru, dan kepala sekolah karena berasal dari keluarga dengan agama yang berbeda.

Polarisasi dalam toleransi beragama menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan dalam dekade terakhir, terutama di kalangan generasi muda yang seharusnya menjadi penerus nilai-nilai toleransi. Survei SETARA Institute di tingkat sekolah menengah atas menunjukkan bahwa persentase siswa dalam kelompok intoleransi aktif meningkat dari 2,4% pada tahun 2016 menjadi 5% pada tahun 2023. Terkait penggunaan hijab, 61,1% responden berpendapat akan lebih nyaman jika semua siswi melakukannya, dan 25,6% di antaranya menyatakan agama atau pandangan orang lain sesat. Parida et al. (2019) menambahkan bahwa hasil riset *Pew Research Center* pada 2020 menunjukkan Indonesia sebagai salah satu negara paling religius di dunia, di mana sekitar 96% rakyat Indonesia menyatakan diri sebagai orang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Namun, paradoksnya, sejak tahun 2006 hingga 2018, terjadi 2.400 kejadian dan 3.177 kasus intoleransi dalam kebebasan beragama di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa religiusitas yang tinggi tidak otomatis berkorelasi dengan toleransi yang tinggi, bahkan dalam beberapa kasus justru menjadi basis untuk sikap eksklusif dan intoleran.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Toleransi Beragama

Faktor pendukung toleransi beragama di Indonesia sangat beragam dan berakar pada kekayaan tradisi, sistem pendidikan, dan kebijakan yang mendukung keberagaman. Peran pendidikan multikultural menjadi faktor fundamental dalam membangun toleransi, dimana Adawiyah et al. (2019) menunjukkan bahwa penerapan pendidikan multikultural diterapkan dalam setiap proses pembelajaran baik di dalam kelas, di luar kelas, di dalam sekolah dan di luar sekolah, dengan bentuk implementasi berupa penyelenggaraan *event-event* keagamaan, hari kartini, dan bulan bahasa. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk toleransi antar umat beragama yang efektif adalah adanya kebebasan dalam menjalankan syariat agama yang dianut oleh masing-masing siswa, dengan strategi agar toleransi beragama selalu diterapkan melalui kasih dan pembiasaan. Habibah et al. (2022) memperkuat temuan ini dengan menekankan

bahwa internalisasi dimensi moderasi beragama dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik dapat diwujudkan dengan menjadikan moderasi beragama sebagai aspek perkembangan landasan hidup, yang mencakup mengkaji lebih dalam tentang makna Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti-kekerasan, dan Akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

Kearifan lokal dan tradisi toleransi yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam membangun harmoni antarumat beragama. Rahimah & Amaluddin (2021) menggambarkan bagaimana masyarakat Desa Gentasari yang memiliki komposisi beragama Islam mayoritas dan Kristen Protestan sebagai minoritas dapat hidup berdampingan dengan harmonis, dimana adanya kegiatan pengajian dengan tema Toleransi Q.S Al-Kafirun 1-6 dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang toleransi yang perlu diterapkan di lingkungan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, tradisi *pela gandong* di Maluku, konsep *menyama braya* di Bali, dan filosofi *tepa selira* dalam budaya Jawa merupakan contoh nyata bagaimana kearifan lokal dapat menjadi fondasi untuk membangun toleransi beragama yang autentik dan berkelanjutan. Kebijakan pemerintah dan regulasi juga memberikan kontribusi positif, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat *grassroots*, dimana berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan konstitusional bagi kebebasan beragama dan perlindungan hak-hak minoritas.

Kompleksitas yang tidak kalah signifikan dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak ditunjukkan oleh faktor penghambat toleransi beragama. Ancaman utama bagi implementasi toleransi menjadi radikalisme dan ekstremisme agama, dimana Indonesia dewasa ini seringkali diterpa isu tentang radikalisme dijelaskan oleh Susanti (2022), dimana gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu semakin tumbuh dan secara terang-terangan menyuarakan ideologi mereka. Aktivitas untuk memaksakan pendapat, keinginan, dan cita-cita keagamaan dengan jalan kekerasan yang didefinisikan sebagai radikalisme agama, telah menjadi ancaman serius bagi keutuhan bangsa dan implementasi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik sosial berpotensi terjadi dalam masyarakat multi-agama akibat terjadinya *human error* dalam memahami teks-teks agama ditambahkan oleh Mallelang et al. (2022), dimana beberapa teks agama dimaknai secara sembarangan tanpa mempertimbangkan aspek sejarah, psikologi, sosial, budaya, dan kondisi situasional keadaan sekitar. Politisasi isu keagamaan juga menjadi faktor penghambat yang serius, terutama dalam konteks kontestasi politik yang menggunakan sentimen agama untuk mobilisasi dukungan, sementara kesenjangan sosial ekonomi seringkali menjadi lahan subur bagi berkembangnya prasangka dan stereotip negatif antarkelompok agama.

3. Peran Institusi dalam Membangun Toleransi Beragama

Peran lembaga pendidikan dalam membangun toleransi beragama memiliki posisi strategis yang tidak dapat digantikan, dimana pendidikan formal, non-formal, dan informal harus bekerja secara sinergis untuk menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Ondja et al. (2023) menekankan bahwa dalam konteks keragaman murid di sekolah, peran Pendidikan Agama Kristen perlu ditekankan dengan menyediakan sumber daya pendidikan agar siswa dan guru memahami ajaran Yesus dan memiliki hati melayani sesama, dimana standar penghormatan terhadap orang lain perlu didasarkan kasih tanpa mempertimbangkan ras, agama atau suku. Tatang & Deak (2022) menambahkan bahwa kekeristenan harus membangun pemahaman keagamaan yang lentur, pluralis dan tetap inklusif, dimana perbedaan yang tajam dapat menjadi mozaik yang indah jika dapat dipelihara dan dinikmati dengan hati yang lapang. Namun tantangan yang dihadapi adalah bahwa proses pembelajaran agama yang diberikan di sekolah-sekolah, meskipun sangat baik dalam hal pembinaan masyarakat, namun pada sisi lain pendidikan agama baik di sekolah umum maupun sekolah berciri khas keagamaan masih lebih

bercorak eksklusif. Muzakki & Santoso (2023) memberikan contoh positif dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang merupakan perguruan tinggi Islam dengan komposisi mahasiswa muslim 30% dan 70% mahasiswa non-muslim yang heterogen, namun tidak pernah terjadi konflik suku, ras dan agama karena implementasi nilai toleransi yang efektif.

Peran organisasi keagamaan dan tokoh agama menjadi kunci dalam membangun toleransi beragama melalui kepemimpinan yang inklusif dan dialog antaragama yang konstruktif. Amtiran & Kriswibowo (2024) mengidentifikasi bahwa peran strategis kepemimpinan agama dalam mempromosikan moderasi beragama melalui pendidikan agama yang inklusif, pengembangan toleransi, dan dialog antaragama menjadi sangat penting, dimana kebutuhan dialog antaragama untuk menciptakan pemahaman dan menghormati kebebasan beragama, serta memperkuat toleransi melalui interaksi yang terbuka dan konstruktif merupakan temuan kunci. Organisasi keagamaan memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mengembangkan pemahaman teologis yang mendalam tentang agama masing-masing, tetapi juga membangun jembatan komunikasi dengan organisasi keagamaan lain untuk menciptakan ruang dialog yang produktif. Peran pemerintah dan masyarakat sipil juga tidak kalah penting dalam menciptakan *framework* kebijakan dan program yang mendukung toleransi beragama, meskipun implementasi di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Sementara peran media dan teknologi informasi memiliki potensi ganda, dimana di satu sisi dapat menjadi sarana untuk memperkuat toleransi dan membangun dialog antar umat beragama, tetapi di sisi lain juga dapat menjadi alat penyebaran ujaran kebencian dan narasi intoleran yang dapat memecah belah harmoni sosial, sehingga diperlukan literasi media yang kuat dan regulasi yang efektif untuk memaksimalkan potensi positif teknologi dalam membangun toleransi beragama.

C. Strategi Dan Rekomendasi Penguatan Toleransi Beragama

1. Model dan *Best Practices* Implementasi Toleransi Beragama

Praktik-praktik terbaik implementasi toleransi beragama di tingkat lokal dan nasional menunjukkan bahwa keberhasilan membangun harmoni antarumat beragama sangat bergantung pada pendekatan yang kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan. Contoh praktik terbaik yang sangat inspiratif dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong diberikan oleh Muzakki & Santoso (2023), dimana sebagai perguruan tinggi Islam dengan komposisi mahasiswa muslim 30% dan 70% mahasiswa non-muslim yang heterogen, institusi ini berhasil menciptakan lingkungan akademik yang harmonis tanpa pernah terjadi konflik suku, ras dan agama. Memahami, menghormati dan menghargai setiap ajaran agama masing-masing sehingga tidak mudah tersinggung ketika ada perbedaan, menghindari topik pembicaraan yang mengarah pada prinsip keyakinan, saling mengingatkan agar selalu mentaati perintah agama masing-masing mahasiswa, dan memberikan porsi yang sama kepada setiap mahasiswa baik saat pembelajaran di kelas, kegiatan kemahasiswaan maupun interaksi mahasiswa yang lain meliputi bentuk implementasi nilai toleransi yang berhasil diterapkan. Toleransi dapat dibangun melalui pendekatan yang praktis dan operasional dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya melalui retorika atau konsep teoretis belaka ditunjukkan oleh model ini.

Studi kasus keberhasilan membangun harmoni antarumat beragama juga dapat dilihat dari pengalaman di tingkat pendidikan dasar dan menengah, dimana Adawiyah et al. (2019) menggambarkan keberhasilan SMP Immanuel Batu dalam menerapkan pendidikan multikultural untuk menciptakan toleransi antar umat beragama. Sekolah ini berhasil mengimplementasikan toleransi melalui penerapan pendidikan multikultural dalam setiap proses pembelajaran baik di dalam kelas, di luar kelas, di dalam sekolah dan di luar sekolah, dengan bentuk implementasi berupa penyelenggaraan *event-event* keagamaan, hari kartini, dan bulan bahasa. Keberhasilan ini didukung oleh adanya kebebasan dalam menjalankan syariat

agama yang dianut oleh masing-masing siswa, dengan strategi agar toleransi beragama selalu diterapkan melalui kasih dan pembiasaan, serta adanya fasilitas pendukung untuk beribadah bagi semua agama. Simanjuntak & Aritontang (2024) menambahkan contoh praktik terbaik dari SMA Katolik Santo-Fransiskus Xaverius di Rute NTT, dimana Ketua OSIS dari sekolah tersebut adalah seorang siswi dari agama Muslim, yang dipilih bukan berdasarkan latar belakang agamanya melainkan karena kinerja dan visi-misi yang baik. Kasus ini menunjukkan bahwa toleransi dapat diwujudkan melalui keterbukaan dalam kepemimpinan dan representasi tanpa diskriminasi agama.

Pembelajaran dari pengalaman internasional menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam mengembangkan model toleransi beragama yang berbasis pada kearifan lokal dan nilai-nilai Pancasila. Amtiran & Kriswibowo (2024) menekankan bahwa moderasi beragama sebagai prinsip yang adil, seimbang, dan toleran menjadi kunci dalam mencegah konflik dan memelihara harmoni dalam masyarakat multikultural, dimana peran strategis kepemimpinan agama dalam mempromosikan moderasi beragama melalui pendidikan agama yang inklusif, pengembangan toleransi, dan dialog antaragama menjadi sangat penting. Berbeda dengan model *melting pot* yang diterapkan di Amerika Serikat atau model multikulturalisme yang berkembang di Kanada dan Australia, Indonesia mengembangkan model yang lebih menekankan pada harmoni dalam keberagaman (*unity in diversity*) yang tercermin dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Model Indonesia juga unik karena mengintegrasikan nilai-nilai religius dengan kearifan lokal, seperti konsep *pela gandong* di Maluku, *menyama braya* di Bali, atau *gotong royong* yang menjadi nilai universal yang dapat mempersatukan berbagai kelompok agama.

2. Strategi Penguatan Toleransi Beragama

Strategi di bidang pendidikan dan kurikulum memerlukan transformasi paradigmatik yang fundamental untuk mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan multikulturalisme secara sistematis dan berkelanjutan. Internalisasi dimensi moderasi beragama dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik dengan menjadikan moderasi beragama sebagai aspek perkembangan landasan hidup ditekankan pentingnya oleh Habibah et al. (2022), yang mencakup mengkaji lebih dalam tentang makna Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti-kekerasan, dan Akomodatif terhadap kebudayaan lokal, menghayati nilai-nilai tersebut, dan ikhlas melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks keragaman murid di sekolah, peran pendidikan agama perlu ditekankan dengan menyediakan sumber daya pendidikan agar siswa dan guru memahami ajaran agama dan memiliki hati melayani sesama ditambahkan oleh Ondja et al. (2023), dimana standar penghormatan terhadap orang lain perlu didasarkan kasih tanpa mempertimbangkan ras, agama atau suku. Strategi ini memerlukan pengembangan kurikulum yang tidak hanya mengajarkan tentang agama masing-masing, tetapi juga tentang agama-agama lain, sejarah toleransi di Indonesia, dan nilai-nilai universal yang dapat menjadi titik temu antarumat beragama.

Strategi di bidang kebijakan dan regulasi harus menciptakan *framework* hukum yang komprehensif dan implementatif untuk melindungi kebebasan beragama sekaligus mencegah penyalahgunaan isu agama untuk kepentingan politik. Sunarno et al. (2023) mengidentifikasi pentingnya peran kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam upaya meminimalisir kasus intoleransi, dimana diperlukan regulasi yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan edukatif. Kebijakan harus mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku intoleransi, perlindungan hak-hak minoritas, dan pencegahan politisasi isu agama dalam kontestasi politik. Selain itu, diperlukan kebijakan afirmatif untuk mendorong partisipasi setara semua kelompok agama dalam kehidupan publik, serta regulasi yang mendukung pembangunan rumah ibadah dan fasilitas keagamaan tanpa diskriminasi. Strategi di bidang pemberdayaan masyarakat harus fokus pada penguatan kapasitas masyarakat sipil

untuk menjadi agen toleransi dan perdamaian, dimana Rahimah & Amaluddin (2021) menunjukkan pentingnya kegiatan-kegiatan seperti pengajian dengan tema toleransi yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan dalam perbedaan.

Strategi di bidang media dan komunikasi publik memerlukan pendekatan yang holistik untuk mengubah narasi publik tentang keberagaman agama dari yang berpotensi konflik menjadi yang mempromosikan harmoni dan kerjasama. Media massa dan platform digital harus berperan aktif dalam menyebarkan konten yang mendorong toleransi, memberikan ruang yang adil untuk semua kelompok agama, dan menghindari pemberitaan yang dapat memicu sentimen negatif antarumat beragama. Diperlukan program literasi media yang komprehensif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi informasi secara kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh *hoax* atau ujaran kebencian yang bernuansa agama. Selain itu, perlu dikembangkan strategi komunikasi publik yang menggunakan tokoh-tokoh lintas agama sebagai *peace ambassador* yang dapat menyampaikan pesan-pesan toleransi dengan kredibilitas dan otoritas yang tinggi.

3. Rekomendasi Kebijakan dan Program

Rekomendasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus mencakup reformulasi regulasi yang ada untuk memastikan perlindungan kebebasan beragama yang efektif dan implementatif di semua tingkatan pemerintahan. Pemerintah pusat perlu menerbitkan regulasi yang lebih spesifik tentang pencegahan intoleransi di lembaga pendidikan, prosedur pembangunan rumah ibadah yang adil dan transparan, serta mekanisme penyelesaian konflik keagamaan yang cepat dan efektif. Pemerintah daerah perlu mengembangkan peraturan daerah yang mendukung kerukunan umat beragama sesuai dengan konteks lokal masing-masing, termasuk alokasi anggaran khusus untuk program-program toleransi beragama dan pembentukan forum kerukunan umat beragama di tingkat desa/kelurahan yang lebih aktif dan efektif. Rekomendasi program pendidikan multikultural harus mengintegrasikan pengembangan kurikulum yang lebih komprehensif tentang toleransi beragama dalam semua jenjang pendidikan, dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Program ini harus mencakup pelatihan guru tentang pendidikan multikultural, pengembangan bahan ajar yang inklusif, dan penciptaan aktivitas ekstrakurikuler yang mendorong interaksi positif antarumat beragama.

Rekomendasi penguatan kapasitas institusi harus fokus pada pengembangan kemampuan lembaga-lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi keagamaan dalam membangun dan memelihara toleransi beragama. Nugroho & Ni'mah (2018) menekankan pentingnya pendidikan yang mampu menjadikan perbedaan sebagai alat untuk menjadi pribadi yang taat tanpa keluar dari fitrahnya, dengan mengajarkan cara hidup di tengah pluralitas bangsa, yang berpijak pada konsep fitrah, bersifat moderat, mengusung misi kemanusiaan (*humanism*), inklusif dalam beragama, dan mampu hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain. Penguatan kapasitas ini harus mencakup pelatihan kepemimpinan lintas agama, pengembangan metodologi dialog antaragama yang efektif, dan pembentukan jaringan kerjasama antarorganisasi keagamaan. Rekomendasi sistem *monitoring* dan evaluasi toleransi beragama memerlukan pengembangan indikator yang komprehensif dan sensitif terhadap konteks lokal untuk mengukur tingkat toleransi dalam masyarakat secara berkala. Sistem ini harus mencakup pengembangan *early warning system* untuk mengidentifikasi potensi konflik keagamaan, mekanisme pelaporan kasus intoleransi yang mudah diakses masyarakat, dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program toleransi beragama. Selain itu, perlu dikembangkan sistem penghargaan bagi individu, komunitas, atau institusi yang berhasil mempromosikan toleransi beragama sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk terus membangun harmoni dalam keberagaman.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa implementasi toleransi beragama dalam kehidupan sosial masyarakat multikultural Indonesia menghadapi paradoks yang kompleks antara potensi harmoni yang besar dengan tantangan intoleransi yang nyata. Konsep toleransi beragama terbukti memiliki dimensi *multifaset* yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan behavioral yang harus terintegrasi secara harmonis dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Dinamika implementasi toleransi beragama menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan meningkatnya kasus intoleransi dari 2,4% pada tahun 2016 menjadi 5% pada tahun 2023 di kalangan siswa, serta tercatat 32 peristiwa gangguan rumah ibadah pada periode Januari hingga September 2022. Faktor-faktor penghambat utama meliputi radikalisme dan ekstremisme agama, politisasi isu keagamaan, kesalahpahaman dalam memahami teks-teks agama, serta sistem pendidikan yang masih bercorak eksklusif, sementara faktor pendukung mencakup kearifan lokal, tradisi toleransi yang mengakar, dan kebijakan pemerintah yang mendukung keberagaman. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai model dan *best practices* yang berhasil diimplementasikan di berbagai institusi pendidikan yang menunjukkan bahwa toleransi dapat dibangun melalui pendekatan praktis dan operasional dalam kehidupan sehari-hari dengan penerapan prinsip kasih, pembiasaan, dan penyediaan ruang yang setara bagi semua kelompok agama.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah pusat dan daerah segera merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan implementatif dalam melindungi kebebasan beragama, termasuk reformulasi regulasi pembangunan rumah ibadah, penguatan mekanisme pencegahan intoleransi di lembaga pendidikan, dan pembentukan sistem early warning untuk mengidentifikasi potensi konflik keagamaan. Lembaga pendidikan perlu melakukan transformasi paradigmatis dengan mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan multikulturalisme secara sistematis dalam kurikulum semua jenjang pendidikan, mengembangkan program pelatihan guru tentang pendidikan multikultural, dan menciptakan lingkungan akademik yang inklusif melalui aktivitas ekstrakurikuler yang mendorong interaksi positif antarumat beragama. Organisasi keagamaan dan tokoh agama diharapkan mengambil peran yang lebih proaktif dalam mempromosikan moderasi beragama melalui dialog antaragama yang konstruktif, pengembangan pemahaman teologis yang inklusif, dan pembentukan jaringan kerjasama lintas agama yang berkelanjutan. Selain itu, perlu dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif dengan indikator yang sensitif terhadap konteks lokal untuk mengukur tingkat toleransi dalam masyarakat secara berkala, serta penguatan peran media dan platform digital dalam menyebarkan narasi toleransi dan mencegah penyebaran ujaran kebencian yang dapat memecah belah harmoni sosial masyarakat multikultural Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, R., Mansur, M., & Handayani, T. (2019). Analisis penerapan pendidikan multikultural dalam menciptakan toleransi antar umat beragama. *Jurnal Civic Hukum*, 4(1), 29-37.
- Amtiran, A. A., & Kriswibowo, A. (2024). Kepemimpinan agama dan dialog antaragama: Strategi pembangunan masyarakat multikultural berbasis moderasi beragama. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 8(3), 331-348.
- Arifin, A. Z. (2021). Implementasi toleransi umat beragama: Telaah hubungan Islam dan Kristen di Duren Sewu Pasuruan Jawa Timur. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 4(1), 81-95.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.

- Casram, C. (2016). Membangun sikap toleransi beragama dalam masyarakat plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(2), 187-198.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Habibah, S. M., Setyowati, R. N., & Fatmawati, F. (2022). Moderasi beragama dalam upaya internalisasi nilai toleransi pada generasi Z. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 126-135.
- Mallelang, A. M. A., KY, I. G. S., Santoso, P., & Saragih, H. J. R. (2022). Resolusi konflik kepercayaan dalam toleransi beragama pada masyarakat multikultural di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 183-192.
- Muzakki, M., & Santoso, B. (2023). Implementasi nilai toleransi bagi mahasiswa UNIMUDA Sorong. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 183-191.
- Nugroho, M. A., & Ni'mah, K. (2018). Konsep pendidikan Islam berwawasan kerukunan pada masyarakat multikultural. *Millah: Journal of Religious Studies*, 17(2), 337-378.
- Ondja, H. I., Kuanine, M. H., Harefa, S., & Metboki, R. J. A. (2023). Implementasi pembelajaran PAK berbasis multikultural dalam membina sikap toleransi siswa di sekolah. *SESAWI: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 5(1), 1-15.
- Parida, N., Karuniawati, Y., & Wilyam, V. (2019). Implementasi sikap toleransi beragama dan pengaruhnya bagi anak di era disrupsi. *Jurnal CMES*, 12(2), 25-35.
- Pritantia, N. R., Kosasih, A., & Supriyono, S. (2021). Pola hubungan sosial masyarakat multikultural dalam gaya hidup beragama (studi kasus kampung Kancana Kabupaten Kuningan). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(3), 165-172.
- Purnama, S. (2021). Implementasi pendidikan multikultural melalui mata pelajaran PPKn untuk mendukung sikap toleransi siswa dalam masyarakat multikultur. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5753-5760.
- Rahimah, L. A., & Amaluddin, A. (2021). Penerapan interaksi sosial antar masyarakat melalui moderasi beragama dan sikap toleransi di Desa Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 341-350.
- Simanjuntak, P., & Aritontang, H. D. (2024). Penerapan nilai-nilai Kristiani dalam lingkungan masyarakat heterogen. *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama dan Filsafat*, 2(1), 74-80.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunarno, A., Ikbal, A., & Indrawati, L. (2023). Upaya meminimalisir kasus intoleransi dalam pendirian tempat ibadah demi terciptanya kohesi sosial pada masyarakat multikultural di Kalimantan Tengah. *Jurnal Paris Langkis*, 3(2), 93-100.
- Suryawan, N. W., & Danial, E. (2016). Implementasi semangat persatuan pada masyarakat multikultural melalui agenda forum kerukunan umat beragama (FKUB) Kabupaten Malang. *HUMANIKA*, 23(1), 46-60.
- Susanti, S. (2022). Moderasi beragama dalam masyarakat multikultural. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 6(2), 168-182.
- Tatang, J., & Deak, V. (2022). Peran pendidikan agama Kristen dalam memelihara interaksi sosial dalam masyarakat multikultural di Indonesia. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(5), 1185-1196.
- Yanto, M., Abidin, Z., & Inayati, M. (2023). Tantangan pendidikan agama Islam dan moderasi beragama dalam menghadapi masyarakat multikultural. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 3(2), 252-257.